

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kinerja perusahaan telah dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel independen yang berbeda dan memperoleh hasil yang berbeda pula. Berikut disajikan hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar referensi.

Putri & Muid (2017), menemukan pengaruh positif signifikan antara ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Asumsinya bahwa komisaris independen belum dapat bekerja dengan optimal. Alasan untuk hasil ini bisa jadi bahwa keberadaan komisaris independen hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi saja atau dengan kata lain independensi mereka tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena pemilihan komisaris independen yang kurang berkompeten. Hal ini penting karena banyak anggota dewan komisaris independen tidak dapat menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan tidak bisa berjalan dengan baik. Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Dewi dkk, (2018) menemukan bahwa komisaris independen mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh ukuran dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris

ternyata belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jumlah dewan komisaris, tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Asumsinya jumlah dewan komisaris yang dimiliki terlalu besar menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil harus didiskusikan terlebih dahulu dan mengasihkan kesepakatan dari semua dewan komisaris. Dengan demikian efektifitas dalam pengambilan keputusan menjadi berkurang dan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan

Prasetyo & Dewayanto (2019), menemukan bahwa keragaman gender dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Asumsinya bahwa keberadaan anggota wanita dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan dengan mempertanyakan kebijakan yang konvensional serta dapat memancing agar diskusi menjadi lebih hidup sehingga memunculkan inovasi baru dalam proses pengambilan keputusan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari berbagai sektor yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *ordinary least square* yang terdapat dalam analisis regresi linear berganda.

Putri dkk (2020), menemukan bahwa struktur kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Asumsinya bahwa tingkat kepemilikan publik yang tinggi membuat proses pengambilan keputusan strategis di masa depan menjadi lebih sulit bagi perusahaan karena konflik kepentingan. Kepemilikan publik juga tidak memiliki pengawasan yang ketat untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang mencerminkan rendahnya porsi

kepemilikan publik perusahaan. Oleh karena itu, besar kecilnya tingkat kepemilikan publik tidak mempengaruhi kinerja perusahaan karena tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda.

Alim & Destriana, (2019) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Asumsinya bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin bagus kinerja keuangannya. Perusahaan besar menghasilkan laba yang lebih stabil daripada perusahaan yang lebih kecil yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan selanjutnya. Sementara Murdiansyah dkk, (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam kinerja perusahaan, besar kecilnya ukuran perusahaan bukan jaminan semakin besar pula kemampuannya dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

## **2.2 Landasan Teori**

Bagian ini menjelaskan teori serta argumentasi untuk menjawab rumusan masalah dan perumusan hipotesis yang telah ditentukan.

### **2.2.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari praktik bisnisnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan juga

dikenal sebagai teori kontraktual dimana menganggap perusahaan sebagai hubungan kontraktual antara anggota perusahaan. Dinyatakan pula bahwa hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal (pemilik) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Hubungan keagenan antara principal dan agent dapat menimbulkan kondisi ketidakseimbangan informasi (*Assymetrical Information*) karena posisi agen yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan principal. Asumsinya bahwa hal tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal dan bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Untuk itu principal akan mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh agen. Akibatnya dari informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan- tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah: (a) *Moral Hazard*; yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal- hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja; (b) *Adverse Selection*; yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar- benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Adanya agency problem di atas, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Mardiyati, 2012) terdiri

dari: (a) *The monitoring expenditures borne by the principle*; adalah biaya pengawasan dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku agen melalui budget restriction dan compensation policies; (b) *The bonding expeditures borne by the agent*; ialah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan; (c) *The residual loss*; adalah penurunan tingkat kesjahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship* (Mardiyati, 2012).

### **2.2.2 Kinerja Perusahaan**

Kinerja perusahaan merupakan hasil atau prestasi kegiatan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Parameter yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan informasi keuangan yang bersumber dari laporan keuangan atau laporan keuangan lainnya.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara berkala efektivitas kegiatan operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja memungkinkan manajer untuk menggunakannya saat membuat keputusan penting dalam bisnis perusahaan, misalkan saat menentukan tingkat gaji karyawan serta Tindakan apa yang akan diambil untuk kedepannya. Sedangkan bagi pihak luar, penilaian kinerja digunakan sebagai alat pendeteksi awal dalam memilih alternatif

investasi yang digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Terdapat dua bentuk pengukuran untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu finansial dan non-finansial. Berikut ini adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ang, 1997):

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

2. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

3. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Rasio profitabilitas dibagi menjadi enam antara lain: *gross profit margin* (GRM), *net profit margin* (NPM), *operating return on assets* (OPROA), *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *operating ratio* (OR).

#### 4. Rasio solvabilitas (*Leverage*)

*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%.

#### 5. Rasio Pasar (*Market ratio*)

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa yang akan mendatang. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, misalnya *price earning ratio (PER)*, *market-to-book ratio*, *Tobin's Q*, dan *price / cash flow ratio*.

Bentuk pengukuran kinerja perusahaan yang paling mudah dan sering digunakan adalah bentuk pengukuran finansial, yaitu dengan menganalisis rasio keuangan perusahaan. Dalam mengukur kinerja perusahaan dengan laporan keuangan yang dimiliki menggunakan rasio *Return On Assets (ROA)*, dimana perusahaan melakukan perbandingan laba atau kemampuan dalam mendapatkan keuntungan terhadap total keseluruhan aset perusahaan yang dimiliki. Apabila semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan semakin baik.

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai *performing measurement* yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil yang

memuaskan akan menarik investor dan para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan demikian, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan harus dapat bekerja dengan optimal agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Sagala & Hadiprajitno, 2019) .

### **2.2.3 Karakteristik Dewan Komisaris**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

*“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”*

Dewan komisaris berperan penting untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kewenangan dan kekuatan. Menurut teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Karena adanya pemberian tanggung jawab dari prinsipal kepada agen, membuat agen menjadi lebih mengerti dan mengetahui tentang perusahaan dan hal ini akan menyebabkan prinsipal tidak dapat mengawasi kinerja dari manajer, sehingga keputusan yang dibuat manajer tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh prinsipal. Karena itu perlu adanya dewan komisaris di dalam perusahaan. Berfungsi sebagai pengawas, dewan komisaris memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan komisaris bertanggungjawab kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan *shareholder* (pemegang saham) untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan oleh direksi.



Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan jalannya pengurusan perseroan sesuai anggaran dasar, fungsi nasihat kepada direksi dalam tugasnya mengurus perseroan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan fungsi pengurusan perseroan dalam keadaan darurat.

Karakteristik dewan komisaris yang diukur dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris minimal beranggotakan 2 komisaris. Sedikit banyaknya anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi efektifitas kinerjanya sebagai pengawas kinerja pihak manajemen. Prasetyo & Dewayanto (2019) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena semakin banyak jumlah anggota dewan maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan lebih efektif sehingga berpotensi untuk meningkatkan sumber daya dan ahli yang berguna dalam proses pengambilan keputusan.

### **2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Rapat dewan komisaris merupakan sarana komunikasi antar anggota dewan komisaris yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai suatu

kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dewan komisaris wajib mengadakan rapat minimal 1 kali dalam 3 tiga bulan dan dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris. Setiap anggota dewan komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat dewan komisaris selama 1 tahun. Rapat dewan komisaris adalah salah satu sumber informasi yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dewan komisaris. Putri & Muid (2017) berpendapat bahwa semakin sering rapat dewan komisaris diadakan, maka akan semakin merata informasi yang didapatkan antara sesama komisaris sehingga keputusan yang dihasilkan semakin baik dan berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik.

### **3. Dewan Komisaris Independen**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen adalah :

*“Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak dari kalangan direksi ataupun pemegang saham dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena dewan komisaris independen berguna sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Keberadaan dewan komisaris saja didalam perusahaan tidaklah cukup, karena dewan komisaris bisa aja berasal dari direksi, manajemen maupun pihak-pihak dari dalam perusahaan. Maka dari itu diperlukanlah dewan komisaris independen. Anggota dewan komisaris diharuskan untuk independen dalam menjalankan tugasnya yaitu memantau kebijakan yang diambil oleh dewan direksi perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan efek wajib memiliki komisaris independen. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang, persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

#### **4. Keragaman Gender Dewan Komisaris**

Keberagaman gender dalam suatu perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menjelaskan bahwa wanita memiliki sifat kehati-hatian serta teliti yang dapat membantu perusahaan menghindari resiko-resiko yang tinggi serta lebih memilih resiko yang lebih kecil dan aman bagi perusahaan sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan. Keberadaan anggota dewan wanita dalam perusahaan sangat membantu menetralsir sifat anggota pria yang cenderung senang mengambil resiko yang tinggi bagi perusahaan. Selain membantu dalam meningkatkan kinerja perusahaan, keberagaman gender dalam perusahaan sendiri saat ini juga dapat menjadi mekanisme dalam membantu mengurangi

agensy problem yang terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa antara prinsipal atau pemilik perusahaan dengan agen atau manajer perusahaan terjadi perbedaan kepentingan, dimana agen lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan adanya dewan yang beraneka ragam gender maka fungsi sebagai kontrol akan lebih baik karena jangkauan pandangan dan pendapat yang lebih luas dapat meningkatkan independensi dewan (Thoomaszen & Hidayat, 2020).

#### **2.2.4 Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan yaitu komposisi kepemilikan perusahaan berdasarkan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.

Pada prinsipnya struktur kepemilikan merupakan sebaran kepemilikan saham yang ada pada sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan ini sendiri terbagi dalam beberapa jenis kepemilikan, Jensen dan Meckling (1976) membedakan kepemilikan saham menjadi tiga pihak, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yang berbentuk perusahaan atau lembaga seperti institusi pemerintah, swasta, baik dari domestik maupun asing. Kepemilikan institusional dapat menjadi alat untuk mengurangi konflik keagenan dengan kemampuannya dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Suparlan, 2019).

##### **2. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan, seperti direksi, manajemen, dan komisaris. Demi mengatasi permasalahan agensi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham lainnya, Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat mengimbangi porsi kepemilikan pihak lainnya. Oleh karena itu, apabila porsi kepemilikan semakin besar maka manajemen akan menyatukan kepentingan dengan pemegang saham lainnya karena berada dalam satu visi (Angela dkk, 2019).

### **1. Kepemilikan Publik**

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar, yang dalam konteks ini adalah masyarakat. Perusahaan membutuhkan adanya suntikan dana atau modal tambahan sebagai saluran pendanaan bagi kegiatan operasional perusahaan. Sumber pendanaan ini dapat didapatkan dari pihak internal (manajemen atau insider) maupun eksternal (masyarakat).

#### **2.2.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran suatu perusahaan berdasarkan dari besarnya jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan (Agasva & Budiantoro, 2020). Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan keuntungan kompetitif lainnya, seperti kekuatan pasar, di mana perusahaan besar akan lebih fleksibel dalam menentukan harga produknya yang berimplikasi pada kinerja perusahaan (Davinda dkk, 2021). Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, manajer perusahaan besar maupun perusahaan kecil melakukan manajemen laba dengan tujuan membuat laba

perusahaan tinggi karena laba yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Tindakan manajemen laba dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Akan tetapi semakin besar ukuran perusahaan tidak hanya akan menambah konflik keagenan melainkan juga meningkatkan beban perusahaan (Apriliani & Dewayanto, 2018).

### **2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis**

Pada bagian ini akan dipaparkan jawaban sementara atau dugaan awal atas masalah yang diteliti. Dalam merumuskan hipotesis perlu mempertimbangkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dibahas dibagian sebelumnya. Berikut ini rincian pembahasan mengenai rumusan hipotesis.

#### **2.3.1 Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan**

Dewan komisaris berperan sebagai pengawas kinerja manajemen dapat mempengaruhi pengelolaan manajemen. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa manajer bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen, sehingga ukuran dewan komisaris perlu ditentukan agar tercipta efisiensi dan peningkatan kinerja perusahaan (Apriliani & Dewayanto, 2018). Keberadaan dewan komisaris di perusahaan dapat menjadi penengah hubungan antara pemilik dengan manajer. Keberadaan mereka dapat mengurangi pengaruh pemilik yang terlalu overpower yang dapat mengganggu fokus manajer sehingga menurunkan kinerja manajemen dalam menciptakan keuntungan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### **2.3.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan**

Struktur kepemilikan pemegang saham berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Teori agensi yang menganggap bahwa struktur kepemilikan merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Struktur kepemilikan yang berbeda-beda akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kebijakan perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dikarenakan perbedaan kepentingan pemegang saham yang berbeda-beda. Pemilik saham mayoritas memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, mereka dapat mempengaruhi prosedur dan aktivitas perusahaan berdasarkan kepentingan mereka. Struktur kepemilikan memiliki efek yang penting terhadap kinerja perusahaan (Andarsari, 2021).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

### **2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan**

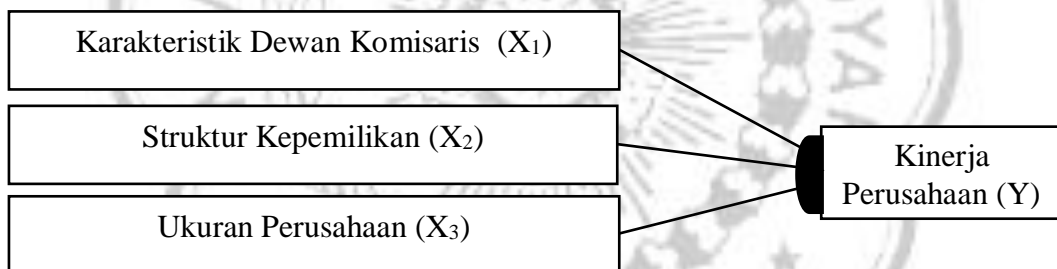
Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar perusahaan, semakin besar keuntungannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Agasva & Budiantoro, 2020) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin meningkat pula kinerjanya, dimana semakin banyak dana baik ekuitas maupun utang yang dikerahkan untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha, maka akan berdampak positif bagi

usaha tersebut dan usaha tersebut akan stabil dan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup. Kinerja yang baik dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan karena besarnya laba yang dihasilkan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

#### 2.4 Kerangka Penelitian

Pada bagian ini memaparkan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan senyatanya terjadi, sehingga muncul adanya hipotesis atau dugaan awal penelitian.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

Berdasarkan kerangka penelitian pada Gambar 2.1 diatas, maka dapat diketahui penelitian ini terdapat 3 (Tiga) hipotesis. Hipotesis yang pertama (H<sub>1</sub>) yaitu karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (H<sub>2</sub>) adalah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (H<sub>3</sub>) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.